

BAB IV

BANTUAN MUHAMMADIYAH BERSAMA PEMERINTAH DAN ORMAS LAIN

Masyarakat sipil global sebagai wadah komunikasi antara LSM, organisasi pemerintahan internasional dan komunitas ilmiah memunculkan kesan menjadi lebih optimis. Negara-bangsa dapat didorong untuk bekerja sama dalam mengelola lingkungan global. Meskipun LSM mungkin hanya satu kekuatan dalam proses ini, keyakinan tentang posisi penting yang didukung persepsi luas bahwa mereka memiliki pemikiran 'ikatan bersama tentang kemanusiaan.¹⁶² Ini bisa menjadi “kacamata” kita memandang apa yang dilakukan Muhammadiyah saat aktif terlibat. Melalui *Muhammadiyah Aid*, persepsi tentang “kemanusiaan” merupakan problem yang perlu diselesaikan bersama adalah pegangannya.¹⁶³ Bersama pemerintah dan LSM lain di Indonesia menjadi langkah konkritnya. Wilayah berbeda yang ditempati Rohingya, dimana mereka bagian dari Myanmar tentu suatu permasalahan yang “menghinggapi” Muhammadiyah sebagai NGO.¹⁶⁴

Apa yang diungkapkan Hossam Said, bahwa pada masa awal Islam, kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui mekanisme “*Bait-ul-Maal*”

¹⁶² David Potter (ed), op.cit, hal 66

¹⁶³ Hossam Said, op.cit, hal 44

¹⁶⁴ Ibid, hal 43

(*the House of Treasury*) yang merupakan dana kolektif untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Pintu masuk untuk sedekah lain merupakan hal yang ditunjukkan. Ini merupakan penjelasan luas mengenai sasaran wakaf, sekolah dan rumah sakit Islam, selain yang dikategorikan dalam Q.S At-Taubah (9): 60. Keadaan darurat selain yang tertulis dalam ayat tersebut menjadi prioritas “baru”. Kebutuhan menurut keyakinan Islam menjadi skala untuk mengetahuinya.¹⁶⁵ Tanpa memandang untuk siapa? (dalam hal ini, Muslim ataupun Rakhine), dimana posisinya? dalam kondisi apa?

Dalam menjalani kehidupan, manusia selalu berhadapan dengan sesuatu yang menimpa dirinya, kemudian disebut *musibah*. Dalam ajaran *tauhid*, peristiwa ini bukanlah persoalan. *Musibah* tidak lain adalah cobaan dan ujian, berupa *hasanat* (sesuatu yang baik) ataukah yang *sayyi'at* (sesuatu yang tidak baik).¹⁶⁶ Peran (salah satunya Muhammadiyah) untuk mengulurkan bantuan.¹⁶⁷ Ini ditujukan sebagai suatu proses untuk merubah “keadaan” suatu kelompok masyarakat yang menghadapi problem dalam kehidupannya. Suatu bentuk kerja yang ditujukan bagi semua manusia.¹⁶⁸

Berikut adalah penjelasan tentang akan berubahnya kondisi masyarakat apabila mempunyai keinginan tersebut. Dalam hal ini, tentu keinginan masyarakat Muslim dan Rakhine menjadi lebih baik adalah kepastian.

¹⁶⁵ Ibid, hal 41

¹⁶⁶ “*Fikih Kebencanaan*”, Majelis Tajdid dan Tarjih PP Muhammadiyah, cetakan kedua, Juli 2015, hal 47

¹⁶⁷ Hossam Said, hal 44

¹⁶⁸ Ibid, hal 42-43

Muhammadiyah menjadi salah satu pihak yang mempunyai peluang untuk membantu mewujudkannya.¹⁶⁹

Q.S Al-Anfal (8): 53

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Q.S Al-Ra'du (13): 11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada*

¹⁶⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Fikih Kebencanaan", hal 48-49

diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.

Langkah ini dimulai dengan Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tertuang dalam surat no: 396/PER/I.0/H/2017 terkait Genosida Etnis Rohingya di Myanmar. Ini merupakan program misi kemanusiaan yang lebih tertib dan terkontrol. Perannya dalam terlibat menghadapi suatu kasus sosial di masyarakat yang melewati batas negara. Berdasar hal inilah kemudian menjadi penyebab adanya aktifitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, diantaranya aktifitas Operasional. Suatu aktifitas yang secara langsung bertalian dengan tercapainya tujuan.¹⁷⁰

Pernyataan yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Bahtiar Effendy dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti ini membahas tentang Rohingya sebagai etnis paling menderita di muka bumi. Penolakan sebagai warga negara Myanmar, serta ketertindasan di Bangladesh menjadi derita bagi mereka. Berdasar data statistik, di Rakhine mereka sebenarnya mayoritas. Tapi karena dianggap imigran gelap, maka tidak bisa dianggap sebagai warga negara Myanmar. Menyebabkan mereka tidak memiliki akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Bahkan, ruang gerak mereka

¹⁷⁰ Rosyad Sholeh, op.cit, hal 44-45

dibatasi hanya pada lingkup geografis tertentu. Sejak 1982, Etnis ini telah mengalami persekusi dan pengusiran berulang kali. Ini merupakan Informasi terakhir yang diperoleh Muhammadiyah saat akan mengeluarkan pernyataan ini. Sepanjang pekan, tidak kurang tiga ribu orang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh karena kebrutalan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Jumlah korban dari etnis Rohingya mencapai kurang lebih delapan ratus orang, termasuk perempuan dan anak-anak.¹⁷¹

Berkaitan dengan hal ini, Muhammadiyah menyatakan sikap antara lain dengan mendesak PBB untuk ikut menangani secara sungguh-sungguh. Bahkan bila perlu mengambil alih penanganan tragedi kemanusiaan di Myanmar. Telah ditemukan bukti secara meyakinkan, bahwa pemerintah negara ini tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. Pada pemerintah Bangladesh, Muhammadiyah meminta dibukanya perbatasan demi alasan kemanusiaan. Ini memungkinkan etnis Rohingya bisa menyelamatkan diri dari persekusi yang terjadi di Myanmar. Kepada para aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia. Muhammadiyah mengharapkan adanya perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri. Muhammadiyah bersedia menjadi *leading sector* dalam mengorganisasikan aktifitas masyarakat

¹⁷¹ “Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah Terkait Genosida Etnis Rohingya Myanmar”, 1 September 2017

ASEAN dan dunia pada umumnya untuk menggalang bantuan dan dukungan kemanusiaan bagi etnis Rohingya.

Desakan juga ditujukan pada perkumpulan negara di Asia Tenggara (ASEAN), agar menekan Myanmar untuk menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. Bila dalam waktu yang dipandang cukup hal tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar, maka wajar bagi ASEAN untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara tersebut. Besarnya efek negatif yang menimpa, maka perlu untuk tidak mengedepankan prinsip non-intervensi dan menggantinya dengan keharusan untuk ikut bertanggung jawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya. Sebelumnya pada tahun 2016 Bahtiar Effendy juga menghimbau segenap negara ASEAN untuk bersatu mendesak Myanmar menghentikan tindakannya. Jangan sampai Myanmar menjadi “duri” bagi ASEAN yang menyebabkan “*image*” tercoreng.¹⁷²

Untuk kancah internasional, Komite Hadiah Nobel diharapkan untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi. Ini dikarenakan kesungguhan untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Myanmar tidak terlihat, justru memperburuk keadaan. Pada Mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Court /ICC*), diharapkan untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida ini. Dalam lingkup nasional, Muhammadiyah meminta Pemerintah Republik

¹⁷² www.suaramuhammadiyah.id, “Bahtiar Effendy: Jangan Biarkan Myanmar Menjadi Duri Bagi ASEAN”, 22 November 2016

Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan diplomasi sunyi (*non-megaphone diplomacy*) yang diterapkan kepada Myanmar. Juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kemungkinan disediakannya sebuah kawasan/daerah di Indonesia yang menampung sementara pengungsi Rohingya. Sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap pengungsi perang Vietnam di Pulau Galang beberapa dekade silam.

Muhammadiyah dalam buku *Fikih Kebencanaan* menjelaskan kata *li ta'arafu* dalam konteks kebencanaan. Artinya “supaya kamu saling kenal mengenal” bukan hanya tentang identitas, tapi juga mengandung makna *li ta'awanu*, yaitu “untuk saling menjalin relasi positif”. Ini dijelaskan berikut:¹⁷³

Q.S.Al-Hujurat (49):13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

¹⁷³ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah “*Fikih Kebencanaan*”, hal 58-59

Q.S Al-Ma'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Merujuk juga pada Gerard Clarke, tentang tipologi organisasi berbasis agama dalam konteks pembangunan internasional. Langkah yang dilakukan Muhammadiyah sebagai organisasi berbasis agama yang mengatur masalah doktrin, memimpin umat beriman dan mewakili mereka dengan kerjasama negara dan aktor-aktor lain dilakukan.¹⁷⁴ Disinilah penjelasan yang cocok untuk organisasi yang berasal dari Indonesia saat berinteraksi dan bekerjasama untuk memberikan bantuan bagi masyarakat Muslim dan Rakhine. Ini diantaranya:

¹⁷⁴ Jonathan Benthall, op.cit, hal 5

A. Diplomasi Kemanusiaan Melalui Jalur Pemerintah

Langkah berikut untuk melibatkan diri, tepatnya di Rakhine adalah “bergandeng tangan” dengan birokrasi yang seimbang (menghubungkan pemerintah negara dengan pemerintah negara lain). Disinilah menempatkan posisi pemerintah Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia) untuk menjalankan diplomasi terhadap pemerintah Myanmar. Tentu disini sebelum menjalankan diplomasi, yang dimulai Kemenlu RI adalah kesepakatan sebagai agenda bersama Muhammadiyah dan LSM lain. *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (HASCO) menjadi nama programnya. Program ini bertujuan memberikan bantuan bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine. Awal bantuan senilai dua juta USD yang merupakan donasi masyarakat Indonesia terkumpul melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Ini sejalan dengan *Advisory Commission on Rakhine State* yang dikeluarkan Agustus 2017.¹⁷⁵

Otoritas Indonesia sebelum terbentuknya AKIM secara resmi 31 Agustus 2017, merespons sikap mayoritas masyarakat Indonesia menanggapi permasalahan yang dihadapi Muslim di Rakhine, Myanmar. Pemerintah telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak secara intensif. Beberapa komunikasi penting telah terjadi, dengan otoritas

¹⁷⁵ www.kemlu.go.id, “Komitmen Bantu Myanmar, Menlu Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan”, 31 Desember 2017

negara Myanmar dan Bangladesh, PBB, dan lembaga yang dinaungi, serta dengan ketua *Advisory Commission on Rakhine State*. Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan ini juga diwakili secara formal oleh Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno Marsudi.

6 November 2016, di Nay pyi daw Menlu Retno dan *State Counsellor* Daw Aung San Suu Kyi membahas secara terbuka situasi dan perkembangan yang terjadi di Rakhine State. Menlu RI menegaskan pentingnya keamanan dan stabilitas dalam upaya meneruskan pembangunan inklusif di Rakhine State. Diharapkan otoritas Myanmar tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim. Masalah inklusifnya, bahwa semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban sama sebagai kunci penyelesaian situasi di Rakhine. Sehingga akses bantuan kemanusiaan penting terbuka, dan Suu Kyi dalam hal ini sependapat. Bantuan kemanusiaan Indonesia lewat PKPU, pasca kejadian 9 Oktober 2016 telah sampai di Rakhine. Didalamnya juga disampaikan tentang bantuan Indonesia dalam pembangunan fasilitas kesehatan di atas tanah 8.000 m². Disepakati juga dalam upaya peningkatan toleransi dan harmoni masyarakat Rakhine, kedua negara meningkatkan kerjasama *interfaith dialogue*. Juga diteruskannya bantuan kapasitas kepada Myanmar

dibidang *good governance*, demokrasi dan HAM. Indonesia akan terus melakukan *engagement* secara intensif, baik dengan Pemerintah Myanmar, dengan komisi yang dipimpin oleh Koffi Anan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap situasi Rakhine State.¹⁷⁶

Tanggal 8 Desember 2016, ketika meresmikan pembukaan *Bali Democracy Forum* (BDF) IX di *Bali International Convention Center* (BICC), Nusa Dua yang dihadiri 101 delegasi negara dan enam organisasi internasional. Acara bertema “*Religion, Democracy and Pluralism*”, dimana Kofi Annan menjadi pembicara kunci, maka didampingi Menlu dan sekretaris kabinet, presiden bertemu dengan mantan Sekjen PBB ini.¹⁷⁷ Tujuan utamanya adalah membicarakan langkah-langkah dalam bantuan kemanusiaan untuk Rohingya.¹⁷⁸

Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 atas undangan *State Counsellor*, diadakan pertemuan berformat *retreat* Menlu ASEAN di Rangoon. Sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan Menlu Retno dengan *State Counsellor* Daw Aung San Suu Kyi sebelumnya. Dalam pertemuan antar Menlu, tema utama yang dibahas adalah membahas

¹⁷⁶ www.kemlu.go.id, “Menlu Retno Tekankan Keprihatinan Indonesia Saat Bahas Situasi Rakhine State Dengan *State Counsellor* Daw Aung San Suu Kyi”, Rabu, 7 Desember 2016

¹⁷⁷ www.youtube.com “Pertemuan dengan *Chairman of the Kofi Annan Foundation*”, Kementerian Sekretariat Negara, , 8 Desember 2016

¹⁷⁸ www.setkab.go.id “Bertemu Kofi Annan, Presiden Jokowi Sampaikan Langkah Indonesia Bantu Rakhine State, Myanmar”, , 8 Desember 2016

perkembangan situasi di Rakhine State, ini merupakan pembahasan secara konstruktif untuk situasi di Rakhine.¹⁷⁹

Pada saat Konferensi Tingkat Tinggi ke-30 ASEAN di Manila, Philipina yang diselenggarakan 29 April 2017 Joko Widodo bertemu secara bilateral dengan Daw Aung San Suu Kyi yang mewakili Myanmar. Membahas upaya perdamaian dan pembangunan rumah sakit di wilayah Rakhine serta menawarkan bantuan kerjasama jangka menengah dan panjang pada pemerintah Myanmar untuk pengembangan wilayah Rakhine. Kestabilan Myanmar juga berdampak pada wilayah ASEAN. Kerjasama peningkatan kapasitas kepolisian (aparatus sipil bersenjata) juga dibahas. Presiden dalam pertemuan ini didampingi Menkopolkam, Menko Perekonomian, Menlu dan Sekretaris Kabinet.¹⁸⁰ Ini merupakan kelanjutan dari sumbangsih Indonesia, sebelumnya melalui Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang telah beroperasi sejak tahun 2012. Mereka membangun sekolah permanen di kawasan tersebut, berupa dua unit gedung sekolah dasar dengan kapasitas 300 siswa. Tahun 2013 Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari Indonesia menyalurkan bantuan bahan pokok yang dikumpulkan dari masyarakat.

¹⁷⁹ www.kemlu.go.id, “Menlu Retno Hadiri ASEAN Retreat di Rangoon, Myanmar”, 18 Desember 2016

¹⁸⁰ www.setkab.go.id, “Bertemu Suu Kyi, Presiden Jokowi: Stabilitas di Myanmar Penting untuk Kawasan”, , 29 April 2017

Setelah terbentuknya AKIM, 3 September 2017 Retno Marsudi yang mendapat perintah Presiden melakukan perjalanan ke Myanmar dan Bangladesh (Menlu RI menyebut sebagai *Marathon Diplomacy for Humanity*). Saat transit di Singapura Menlu mendapat telepon dari Menlu Belanda. Dimana dalam komunikasi ini, Belanda menegaskan komitmen: untuk mendukung upaya yang dilakukan Indonesia dan siap untuk berkontribusi dalam implementasi yang dikeluarkan *Advisory Commission on Rakhine State*. Saat tiba di ibukota Myanmar, Nay pyi daw, Menlu RI mendapat telepon dari Menlu Iran. Dalam komunikasi ini, Iran siap *men-support* upaya diplomasi kemanusiaan dan siap membantu.¹⁸¹ Sebelumnya, hal yang sama dikomunikasikan oleh Menlu Inggris dan Turki sebelum Retno Marsudi berangkat ke Myanmar.¹⁸²

Tanggal 4 September 2017, menlu mengadakan pertemuan dengan *Commander in Chief of Defence Service Myanmar, Senior General U Min Aung Hlaing* membahas prioritas utama tentang: *De-escalasi* dan *Protection for all*. Hal ini dilakukan, karena militer merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat penting (krusial) dalam terjadinya perdamaian. Diharapkan oleh Indonesia dan dunia internasional, bahwa peran militer menjadi solusi dalam penyelesaian masalah ini. Otoritas keamanan perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang

¹⁸¹ www.youtube, "Wawancara dengan Menlu RI, Retno Marsudi", METRO PAGI PRIME TIME

¹⁸² www.lazismu.org, "Krisis Kemanusiaan: Duka Rohingya, Duka Kita semua", 13 September 2017

terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang suku dan agama.¹⁸³ Dalam kesempatan ini U Min Aung Hlaing menyebutkan, bahwa otoritas keamanan telah memulihkan keamanan dan stabilitas di wilayah ini.

Berikutnya dengan *State Counsellor* Myanmar Daw Aung San Suu Kyi. Dalam pertemuan ini, mewakili Indonesia, Retno Marsudi mengusulkan 4+1: Mengembalikan stabilitas dan keamanan; Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; Memberikan perlindungan kepada semua orang di *Rakhine State* tanpa melihat latar belakang suku dan agama; Membuka akses untuk bantuan kemanusiaan; ditambah satu elemen, pentingnya implementasi dari rekomendasi *Advisory Commission on Rakhine State*. Pertemuan selanjutnya dengan pejabat Menteri/ setingkat Menteri yang memegang portofolio strategis, diantaranya: Menteri pada kantor kepresidenan Myanmar U Kyaw Tint Swe, *National Security Advisory* U Thaung Tun dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Myanmar. Di negara ini, Indonesia mengusulkan juga dibentuknya mekanisme penyaluran bantuan yang melibatkan negara-negara ASEAN dan *International Committee for the Red Cross* (ICRC) dikoordinasi pemerintah Myanmar.¹⁸⁴

¹⁸³ www.youtube.com, "Wawancara Eksklusif Menlu Retno Marsudi", METROTV.COM, 11 September 2017

¹⁸⁴ www.setkab.go.id "Selesaikan Krisis di Rakhine State, Menlu Retno Sampaikan Usulan Formula 4+1 Kepada Suu Kyi", 4 September 2017 dan "Wawancara Eksklusif Menlu Retno Marsudi", METROTV.COM, 11 September 2017

Hari berikutnya, Selasa 5 September 2017 Menlu juga melakukan pertemuan dengan otoritas di Dhaka, Bangladesh. Untuk membahas tentang bantuan kemanusiaan bagi Rohingya, diantaranya: Bertemu dengan Menlu Bangladesh, Mahmood Ali dan pada malam harinya bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh, Hasina. Juga bertemu dengan Badan Kemanusiaan PBB untuk Pengungsi (UNHCR/ *United Nations High Commissioner for Refugees*) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (*International Organization for Migration/IOM*) yang sedang berada di Bangladesh.¹⁸⁵ Di sini didapatkan informasi mengenai kondisi pengungsi Rohingya secara langsung. Menariknya, pada saat itu adalah hari libur menyambut Idul Adha.

Usulan 4+1 diatas juga dilakukan pada pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Astana, Kazakhstan, 10-11 September 2017. Simpati atas krisis ini membuat Indonesia berkomitmen mengatasinya dengan bersinerginya masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Ini dimuat dalam dokumen "*OIC Chairman's Summary Report of the Meeting of Heads of State and Government on the Rohingya Muslim Community in Myanmar*" yang disahkan oleh para anggota OKI di sela-sela berlangsungnya KTT OKI Pertama mengenai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi. Disamping memuat berbagai

¹⁸⁵ www.youtube.com, Metro Pagi *Prime Time*

posisi negara-negara OKI mengenai situasi di Rakhine State, Myanmar.¹⁸⁶

Berikutnya saat KTT ke-31 ASEAN yang kembali diselenggarakan di Philipina 10-14 November 2017. Di sela-sela konferensi ini, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di *Philippines International Convention Center* (PICC), Manila, Philipina, Senin 13 November 2017. Siaran Pers Sekretariat Presiden menyebutkan, dalam pertemuan ini dibahas masalah penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. Kedua tokoh ini mempunyai kekhawatiran sama mengenai krisis kemanusiaan di Rakhine State, sehingga bersepakat untuk terus berupaya membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di bagian wilayah Myanmar. Dibahas pula pentingnya segera diselesaikannya Nota Kesepahaman Repatriasi antara Myanmar dan Bangladesh. ASEAN dan PBB memiliki misi dan agenda yang sama, sehingga sinergi keduanya harus terus diperkuat.¹⁸⁷

Joko Widodo sebagai presiden RI mempunyai agenda kenegaraan. Diantaranya agenda kunjungan ke lima negara, salah satunya adalah Bangladesh, Sabtu-Ahad, 27-28 Januari 2018. Di negara ini, agenda presiden adalah mengunjungi pengungsi Rohingya di Cox's Bazar dan

¹⁸⁶ www.kemlu.go.id, "Indonesia Dorong OKI untuk Bekerja Sama Mencari Penyelesaian Masalah di Myanmar", 11 September 2017

¹⁸⁷ www.kemlu.go.id, "Bertemu Presiden Jokowi, Sekjen PBB Apresiasi Peran Indonesia Dalam Krisis di Rakhine State", 14 Nov 2017

melakukan pertemuan bilateral dengan otoritas Bangladesh. Disambut *Deputy Commissioner, Superintendent of Police* Bangladesh, Ali Hossain yang menjelaskan tentang penanganan terhadap pengungsi *Rakhine State* di kamp pengungsi Jamtoli, sub distrik Ukhiya. Presiden meninjau langsung salah satu fasilitas kesehatan hasil kerjasama pemerintah dan LSM di Nusantara, *Indonesia Humanitarian Alliance-the Dreamers Medical Camps*. Disini Presiden memberikan bantuan simbolis.¹⁸⁸ Pertemuan dengan otoritas Bangladesh untuk membahas masalah ekonomi juga membahas masalah etnis Rohingya. Antara lain dengan Presiden Abdul Hamid, Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Menlu Abul Hasan Mahmood Ali.

Jumat, 27 April 2018 Presiden RI bertemu dengan presiden baru Myanmar, Win Myint saat agenda kunjungan kerja di negara Singapura. Disini Presiden Jokowi menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus membantu Myanmar. Utamanya terkait pemulangan pengungsi dari Cox's Bazar ke *Rakhine State* secara sukarela, aman dan terhormat. Presiden Jokowi juga menyinggung masuknya pengungsi ke wilayah Indonesia. Presiden dalam pertemuan ini didampingi Menkopolkam,

¹⁸⁸ www.presidentri.go.id, "Kunjungi Kamp Pengungsian *Rakhine State* di Cox's Bazar", 28 Januari 2018

Menko Perekonomian, Menlu, Menteri Perdagangan, Kepala Staf Kepresidenan dan Dubes RI untuk Singapura.¹⁸⁹

B. Diplomasi Kemanusiaan Melalui Jalur Non-Pemerintah

AKIM atau IHAM (*Indonesia Humanitarian Alliance for Myanmar*) merupakan aliansi sebelas lembaga kemanusiaan di Indonesia yang bekerjasama dengan Kemenlu RI dan seluruh masyarakat Indonesia. Merujuk lagi pada Hossam Said, tentang lembaga pemerintah yang berwenang mengurus hal ini. Dengan meluasnya wilayah yang harus ditangani, serta kompleksnya permasalahan yang ada. Langkah baru muncul, merujuk tafsir Muhammad Rasyid Ridha tentang hal ini (Q.S.At Taubah: 60):”*mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai al-jubat, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai al-hazanah (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang-orang Muslim.*” Dalam tafsir ini petugas merupakan sosok yang diangkat (diakui) oleh pemerintah, tanpa adanya syarat utama didalamnya. Abu Zahrah melonggarkannya dengan pernyataan:”*al-ashlu fi al-zakat an yajma’aha kullaha waliy al-amri aw man yanub ‘anhu*” (pada dasarnya zakat

¹⁸⁹ www.setkab.go.id, “*Bertemu Presiden Myanmar, Presiden Jokowi Sampaikan Kesiapan Bantu Pemulangan Pengungsi Rohingya*”, 27 April 2018

dikumpulkan semuanya oleh pemerintah atau yang mewakilinya). Salah satunya melalui organisasi yang diawasi oleh pemerintah.¹⁹⁰

Pengawasan disini tidaklah secara langsung, namun organisasi tersebut memiliki akuntabilitas sebagai hal mutlak, setidaknya diakui oleh pemerintah (dalam hal ini Myanmar), karena berhubungan dengan izin operasional. Akuntabilitas sendiri menjadi hal perlu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas donasi yang sudah disalurkan. Baik itu untuk komunitas Muslim maupun Budha (penerima bantuan/ amal adalah Muslim dan non Muslim.¹⁹¹ Dalam hal ini anggota AKIM memenuhi hal bersifat mutlak tersebut.

Hal yang dilakukan diantaranya *Release Penanganan Kemanusiaan di Rakhine Myanmar*.¹⁹² Sebagai informasi, bahwa secara bersama-sama berkomitmen membantu penanganan pemasalahan kemanusiaan di Myanmar. Aliansi ini terdiri dari sebelas lembaga kemanusiaan di Indonesia. Antara lain *Muhammadiyah Disaster Management Centre*, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim- *Nahdlatul Ulama*, PKPU *Human Initiative*, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Dompot Peduli Ummat–*Daarut Tauhiid*, LAZIS Wahdah, Laznas LMI,

¹⁹⁰ M. Quraish Shihab, “*Membunikan Al Quran*”, Mizan, cetakan XXIX, Januari 2006, hal 326

¹⁹¹ Hossam Said, hal 42

¹⁹² suara sosmed, “*Release Resmi Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar*”, 5 September 2017

Aksi Cepat Tanggap, Lazis Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dan *Social Trust Fund*–UIN Jakarta.

Isi Release ini berkaitan dengan maraknya informasi tentang problem Rohingya di Myanmar, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pemahaman bersama. Ini menjadi landasan berbagai pihak dalam membantu penanganan masalah konflik yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Hal yang juga perlu di jauhi dan di hindari, antara lain pernyataan keras berupa kecaman/ tekanan politik dan lain-lain. Hal ini akan berimplikasi menjadi kontra produktif terhadap rintisan kerja kemanusiaan yang dibangun baik oleh Pemerintah RI maupun berbagai organisasi kemanusiaan yang membantu masyarakat Rohingya. Aliansi ini akan bekerja secara konkrit dalam membantu penanganan masalah konflik dan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Semua ini melalui pendekatan *humanitarian development* yang akan menyoar empat isu dasar yaitu ; Kesehatan, Pendidikan, mata pencahariaan (*livelihood*) dan pemenuhan layanan dasar (*relief*).

Program yang dijalankan ini menjadi bagian dari *Soft Diplomacy* bukan "*Silent Diplomacy*". Pendekatan tersebut selama ini selalu bisa diterima oleh pemerintah Myanmar dalam membantu mengatasi dampak konflik sosial yang terjadi. Indonesia merupakan satu-satunya yang masih dan dapat diterima oleh Pemerintah Myanmar saat ini. Banyaknya kalimat

“negatif” tentang genosida kepada pemerintah Myanmar, dirasa tidak memberi efek positif dalam upaya kerja kemanusiaan dan penyelesaian konflik. Bahkan semakin menekan etnis Rohingya di Myanmar.

Problem Rohingya merupakan hal yang kompleks, etnis rohingya sendiri tidak homogen atau tunggal. Sebagaimana disebutkan dalam laporan *Advisory Commission of Rakhine State*. Status kewarganegaraan yang diperoleh belumlah diterima seluruh masyarakat Rohingya. Hal ini dikarenakan adanya standar identifikasi mereka yang layak mendapatkan versi Myanmar. Masyarakat Rohingya yang mendapatkan status kewarganegaraan merupakan warga yang terlahir di Myanmar. Sedangkan kaum Rohingya yang tidak lahir di negara ini (imigran) tidaklah diberi status kewarganegaraan. Identifikasinya dengan problem interaksi saat berkomunikasi, dimana saat melakukannya tidak bisa berbahasa Myanmar dan hanya menggunakan bahasa Bengali. Rakhine merupakan negara bagian kedua termiskin di Myanmar, dan juga problem gizi buruk yang cukup tinggi.

Dari sisi demografi, Rakhine sebagai satu-satunya negara bagian yang mayoritas Muslim bisa menyulut konflik sosial. Tuduhan genosida bisa ditujukan balik pada mereka dan menjadi alasan untuk “memusnahkan” etnis Rohingya. Saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 soal Pengungsi, sehingga pengelolaan pengungsi dan

pencari suaka politik menimbulkan berbagai tantangan. Dalam proses penggalangan dana juga perlu dihindari menggunakan gambar yang mengganggu nilai-nilai kemanusiaan. Karena

AKIM bersama-sama Pemerintah dan Masyarakat Indonesia bersama-sama mendorong "Kemanusiaan tanpa batas, membantu dengan menebar cinta bukan dengan menebar kebencian"

Adapun tahapan yang telah dan akan dicapai AKIM saat ini diantaranya pembangunan di Mrauk U:¹⁹³

1. Pembangunan Rumah Sakit Indonesia dengan luas 8.000 m² yang sedang dilakukan. Pengurugan tanah dan pembuatan pagar merupakan tahap yang telah dilakukan.
2. Pembangunan ruang dokter dan perawat yang dibangun sejak September 2017.
3. Gedung utama Rumah Sakit dengan luas lebih dari 1.000 m².
4. Pembangunan tempat ini melibatkan pekerja dari komunitas Rakhine dan Muslim. Ini bertujuan juga menguatkan komunikasi dua komunitas ini dalam bidang ekonomi.

¹⁹³ "Wawancara dengan Menlu RI, Retno Marsudi", www.metrotvnews.com

C. Bantuan Muhammadiyah pada Rohingya

Sebagai organisasi dakwah yang dalam pelaksanaannya tidak khusus pada jama'ah tertentu saja, maka peran dan partisipasi besar Muhammadiyah dalam penanganan etnis Rohingya tercatat baik. Berdasar waktu, hal ini merupakan kelanjutan yang telah dilakukan Muhammadiyah sejak tahun 2012. Waktu itu di perbatasan dua negara (Myanmar dan Bangladesh) telah ada sekitar tiga ratus ribu pengungsi. Melalui LAZISMU (PPM, PWM, PDM dan PCM) bantuan dari masyarakat Indonesia dikumpulkan.¹⁹⁴

Di Aceh

Indonesia merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan etnis Rohingya untuk mengungsi. Mereka masuk ke negeri ini mencari perlindungan dan bantuan. Etnis ini mulai “mendarat” di Aceh bulan April 2015. Saat bulan Ramadhan tahun 1436 H, sekitar dua bulan setelah kedatangan mereka di Serambi Mekah diadakan kegiatan kemanusiaan yang salah satunya terlibat adalah LAZISMU. Kegiatan ini melibatkan tiga kelompok umur, yakni usia 7-11 tahun, usia 12-15 tahun dan usia 16-18 tahun. Juga diadakan dapur sehat Ramadhan untuk pemenuhan gizi dan bingkisan Ramadhan yang berasal dari bantuan donatur. Disebutkan oleh direktur program Development LAZISMU, Eko Purwanto. Bahwa

¹⁹⁴ www.lazismu.org, “Misi Kemanusiaan Muhammadiyah Aid Berangkat ke Bangladesh”, 22 September 2017

tiga kelompok umur ini dibagi dalam dua kelas. Mereka mendapat materi ajar berupa Baca Tulis Al Qur'an, menggambar, mewarnai, latihan berbahasa Indonesia dan Inggris serta aktifitas *outdoor* berupa permainan sekaligus pendampingan. Mereka yang sejak kedatangan tinggal di tempat pelelangan ikan, 16 Juni 2015 dipindahkan pemerintah Aceh ke BLK Blang Odei. Meski dengan konsekuensi adanya pembatasan komunikasi dengan masyarakat Aceh sendiri. Logistik di sini tercukupi dengan tempat simpan dalam gedung pemerintah dan Muhammadiyah. Kesehatan juga menjadi pemantauan dari Muhammadiyah dengan merujuk pada kondisi kejiwaan yang masih labil, karena kelelahan secara jasmani dan ruhani.¹⁹⁵

Bermukimnya masyarakat Rohingya di BLK ini ternyata kemudian mengalami perubahan. Berikutnya pada tanggal 6 Mei 2018. Sebagai bentuk program penyaluran dana ZISKA, LAZISMU Lhokseumawe menyerahkan tas bermotif Aceh kepada para pengungsi Rohingya. Ini bertujuan, selain sebagai tempat penyimpanan bantuan yang pengungsi terima, juga bisa sebagai bentuk persiapan untuk pemindahan lokasi penampungan menuju Langsa. Ketua LAZISMU Lhokseumawe, Farhan Zuhri menyebutkan, setelah kedatangan pengungsi ini donasi yang telah

¹⁹⁵ www.beritasatu.com, "Aksi Kemanusiaan LAZISMU bagi Rohingya", 21 Juni 2015

terhimpun dari para donatur berjumlah 71 tas dan delapan mainan anak-anak.¹⁹⁶

Di Myanmar

Sebelum keluar *Final Report* dari *Advisory Commission on Rakhine State*, program *Muhammadiyah Aid* telah mengimplementasikannya dengan bertindak langsung di Rakhine. Bantuan Muhammadiyah difokuskan pada penanganan *emergency*, *recovery*, dan *rekonsiliasi* bagi warga Rohingya. Penanganan awal, dalam hal ini *emergency* diberikan dalam bentuk obat-obatan, kebutuhan pangan dan sandang. Selanjutnya program berkelanjutan dan permanen, yaitu *recovery* dan mediasi (*rekonsiliasi*). Dalam tahapan *recovery*, Muhammadiyah Aid menjalankan program pendidikan (membangun sarana pendidikan) dan pengobatan (membangun klinik).

Dalam tahapan rekonsiliasi, setelah LAZISMU berhasil mengumpulkan dana kemanusiaan sebesar 12,5 milyar rupiah. Diwujudkan secara berkala berupa pembangunan pasar (ekonomi), rumah sakit (kesehatan) dan juga sekolah (pendidikan). Ketiganya merupakan bentuk tanggap darurat.¹⁹⁷ Pemilihan pasar sebagai alat rekonsiliasi ini, sesuai dengan hasil *assessment* yang telah dijalankan MDMC awal Januari dan Maret 2017. Pembangunan kembali pasar sebagai simbol

¹⁹⁶ www.lazismu.org, "LAZISMU Lhokseumawe Serahkan Tas Motif Aceh untuk Muslim Rohingya", 7 Mei 2018

¹⁹⁷ <https://pwmu.co>, "Terhimpun 12,5 milyar, LAZISMU akan Dirikan Pasar Perdamaian untuk Rohingya", 20 September 2017

perdamaian dikarenakan menjadi forum bersama tempat bertemu semua pihak (*Friendly Market*). Tempat ini bisa menjadi rekonsiliasi pihak-pihak yang bertikai, antara masyarakat Rohingya dengan etnik yang lain, atau juga antara rakyat dengan pemerintah Myanmar demi perdamaian berkelanjutan. Semua ini menunjukkan permasalahan bahwa penanganan bantuan untuk Rohingya tidaklah sesederhana yang dibayangkan banyak orang.¹⁹⁸ Ini bisa dikategorikan sebagai upaya diplomatik yang efektif, selain desakan yang dilakukan komunitas internasional untuk memaksa agar tindakan kekerasan dihentikan. Sebelumnya, untuk kebutuhan mendesak warga Rohingya telah didistribusikan dana satu milyar rupiah.

Di Bangladesh

Permasalahan yang terjadi di Myanmar menjadi melebar. Warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh, negara yang kebetulan berbatasan dengan Myanmar. Ini terjadi karena ada konflik yang menyebabkan dibumihanguskannya desa-desa dan warga tersisa mengalami kelaparan.¹⁹⁹ Disikapi oleh Muhammadiyah *Aid* dan AKIM dengan mengirimkan tim bantuan medis tanggal 22 September 2017 berangkat ke Distrik Cox's Bazar, Bangladesh. Berikutnya bergabung dalam IOM dan WHO. Kerjasama dengan WHO dalam penanganan masalah ini bisa dianggap sebagai bentuk pengulangan dalam tugas di Banda Aceh pasca-

¹⁹⁸ sangpencerah.id, “*Terus Bantu Rohingya, Muhammadiyah Dirikan Pasar di Rakhine State*”, 10 September 2017

¹⁹⁹ Parstoday.com, “*Muhammadiyah Himpun Dana 20 Miliar Bantu Rohingya*”, 4 November 2017

tsunami Desember 2004. Sinergi ini membuat banyak perubahan cukup berarti.²⁰⁰

Menurut wakil ketua MDMC, *Muhammadiyah Aid* sendiri mengirim tiga dokter dan sembilan perawat serta personel supervisi. Di sini diperlukan ijin resmi dari pemerintah Bangladesh dan wajib bermitra dengan LSM lokal untuk segala aktifitas kemanusiaan. Penyaluran bantuan juga harus dilaksanakan oleh mitra lokal. Pola ini berkaitan dengan jatah kuota yang diperoleh masing-masing organisasi aliansi kemanusiaan. Hal ini menjadikan tim bekerjasama dengan empat belas LSM lokal untuk melakukan pelayanan kesehatan sekaligus memberikan bantuan obat-obatan dan makanan nutrisi balita.²⁰¹ Pada saat Konferensi Pers keberangkatan tim, disampaikan juga oleh Direktur LAZISMU, Andar Nubowo dana bantuan yang telah terhimpun melalui LAZISMU. Andar mengungkapkan, hingga Jumat, 22 September 2017 telah terhimpun dana dari masyarakat sebesar Rp.14.115.999.310,50.²⁰²

Dalam wawancara yang dilakukan LAZISMU dengan Koordinator Tim Medis Muhammadiyah sekaligus IHA (*Indonesia Humanitarian Alliance*), Corona Rintawan. Dijelaskan, bahwa sebelum pemberangkatan tim, langkah awalnya adalah pengiriman perwakilan. *Muhammadiyah Aid*

²⁰⁰ www.lazismu.org, “*Muhammadiyah Aid Terjunks Tim 9 ke Bangladesh*”, 30 Januari 2018

²⁰¹ Tribunnews, “*Muhammadiyah Berangkatkan Tim Medis ke Bangladesh Bantu Pengungsi Rohingya*”, 22 September 2017

²⁰² www.lazismu.org, “*Misi Kemanusiaan untuk Rohingya, LAZISMU Himpun Dana Capai 14 Milyar*”, 22 September 2017

sendiri diwakili Abdoel Malik R untuk memperoleh gambaran tentang situasi dan komunikasi awal dengan calon mitra dari LSM Bangladesh. Bertujuan untuk memastikan bentuk kerjasama dan pemenuhan dokumen yang diperlukan. Informasi didapatkan juga, bahwa proses pengajuan perijinan untuk bantuan kemanusiaan ke negara ini dirasa rumit. Sehingga langkah berikutnya (dua hari sebelum tim medis tiba) koordinator tim telah lebih dahulu tiba di negara ini. Di Dhaka, ibukota Bangladesh diadakan pertemuan secara intensif (10.00-16.00 waktu setempat) untuk membuat *draft* kesepakatan dan perjanjian yang diselesaikan saat itu juga. Malam harinya dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang dibuat dan ditandatangani oleh dua pihak ((*Muhammadiyah Aid* dan Mitra Lokal, *We the Dreamer*). Selanjutnya dokumen ini dikirimkan oleh mitra lokal ke pemerintah daerah di Cox's Bazar. Didapatlah ijin resmi dari *Civil Surgeon Office* dan Otoritas Kepolisian. Pengawasan ketat dilakukan otoritas negara ini. Layanan yang dilakukan adalah layanan kesehatan primer dan rawat luka sederhana. Khusus untuk anak yang terkena diare, diberikan antibiotik dan cairan oralit untuk mencegah dehidrasi. Pasien yang datang sekitar 250 orang setiap harinya di posko sederhana (1,5 jam dari pusat kota Cox Bazar). Pemberian juga nutrisi pada ibu hamil dan menyusui termasuk anak balita.²⁰³

²⁰³ www.lazismu.org, "Dokter Corona Rintawan:Layanan Kesehatan untuk Warga Rohingya Nilai Penting Kemanusiaan", 4 Oktober 2017

Muhammadiyah Aid yang tiba di Bangladesh tepatnya di Dhaka (ibukota negara), kemudian melanjutkan perjalanan ke Cox's Bazar dengan menggunakan pesawat selama empat puluh menit. Hal ini dilakukan karena bila menggunakan jalur darat akan memakan waktu dua belas jam, disebabkan kondisi jalan yang rusak serta alasan keamanan. Pernah terjadi pembunuhan massal dua puluh orang asing yang ada di sebuah restoran. Ini menyebabkan larangan untuk sendirian saat jalan malam atau makan sendirian di restoran.²⁰⁴ Di tempat tujuan, terlihat keadaan pengungsi yang menderita. Atap terpal plastik *camp* pengungsi yang warna-warni menunjukkan tentang derita yang menimpa mereka. Begitu juga tampilan mereka yang kusam menguatkan hal ini. Malam hari semakin menggelapkan, karena aliran lampu yang terbatas untuk *camp* ini. Kondisi cuaca dingin di tempat ini, karena pagi dan malam hari hujan turun cukup deras. Menambah tingkat kerawanan kesehatan pengungsi. Masjid darurat juga didirikan di setiap blok untuk ibadah para pengungsi. Ada dua belas titik pengungsian di Cox's Bazar, dengan 430.000 jiwa mendiaminya. Terbesar adalah Palukali, dengan jumlah pengungsi sekitar 15-20 ribu jiwa. Kompleks perbukitan yang didiami pengungsi berdasar keputusan otoritas Bangladesh akan dibangun kantor layanan administrasi. Pengungsi akan dipindahkan ke lokasi milik negara, karena

²⁰⁴ www.lazismu.org, "Meski Sulit, Tim Muhammadiyah Aid Berhasil Masuk di Cox's Bazar Bangladesh", 25 September 2017

yang ditempati merupakan milik pribadi dan juga untuk mengantisipasi cuaca yang tidak menentu. Pobleem lain adalah pemenuhan kebutuhan hidup mereka yang masih tergantung belas kasihan. Padahal di Bangladesh sendiri, banyak juga masyarakat yang dalam kondisi kekurangan.²⁰⁵

Andar Nubowo menginformasikan hal di atas ini merupakan tahapan pertama yang fokus pada tanggap darurat. Tepatnya Rabu 27 September 2017 Muhammadiyah Aid membuka posko layanan kesehatan gratis (*medical treatment*) di Thangkali. Daerah ini merupakan perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Di sini ada empat tenaga medis Muhammadiyah dan dua tenaga medis lokal (salah satunya dikenal dengan nama dokter Haliq Ismail). Menurut Corona, kondisi cuaca yang tidak menentu ditambah fasilitas air bersih dan MCK serta kebersihan *camp* menjadikan rawan gejala penyakit (diare, infeksi, saluran pernapasan dan penyakit kulit). Berdasar pantauan keliling koordinator tim dan wakil ketua MDMC (Rahmawati Husein). Diperkirakan ada sekitar seratus ribu pengungsi di area lapangan sekolah. Masalah infeksi (termasuk saluran pencernaan) dan malnutrisi yang diderita pengungsi memerlukan penambahan tim medis, alat kesehatan dan obat-obatan. Ditambah juga layanan yang dibatasi otoritas negara sampai pukul 17.00.

²⁰⁵ www.lazismu.org, “Pengungsi Rohingya, Membutuhkan Nutrisi Makanan Tinimbang Pakaian Bekas”, 26 September 2017

Dengan pertimbangan, tidak adanya listrik dan jaminan keamanan bagi relawan. Problem lain adalah komunikasi yang berjalan saat pelayanan kesehatan karena bahasa berbeda, sehingga diperlukan penerjemah lokal.²⁰⁶ Mengikuti aturan otoritas, Muhammadiyah Aid sendiri dalam aktifitasnya sebagai koordinator kluster kesehatan untuk para pengungsi, berupa tim yang bergantian (menurut Corona, setiap lima belas hari). Pelayanan dalam bentuk posko ini menyesuaikan tempat tinggal pengungsi per blok (bukit kecil tandus dan berdebu). Ini dikarenakan para pengungsi berdasar keputusan otoritas Bangladesh beraktifitas hanya di sekitar *camp* pengungsian.

Corona juga menjelaskan, selain pelayanan di atas diberikan juga tambahan kepada anak-anak berupa ajaran pendidikan dan permainan. Materi yang diajarkan berupa pengenalan huruf dan angka, bagian-bagian tubuh, menghafal surat pendek Al Quran. Ditambah pelatihan kesehatan seperti menyikat gigi, menggunting kuku dan mencuci tangan. Ada juga program khusus dari WHO yang diserahkan tanggung jawabnya kepada Muhammadiyah Aid dibawah pimpinan dokter Nuha Aulia Rahman dan perawat Kharisma Dwi Angga. *Acute Jaundice Syndrom* (penyakit

²⁰⁶ www.lazismu.org, “Muhammadiyah Aid Buka Posko Layani Kesehatan Pengungsi Rohingya di Camp Thangkali, Bangladesh”, 28 September 2017

kuning), mengawasi renovasi atap posko medis IHA. Juga pembuatan saluran air untuk mengantisipasi banjir.²⁰⁷

Dari semua problem yang ada ini, maka didirikanlah Rumah Sakit Lapangan Indonesia. Menghadapi kasus *outbreak diftery* yang menimpa anak-anak dilibatkan dokter spesialis anak dalam tim. Salah satunya tim relawan medis dari Aceh (dokter Aslinar yang bertugas di Jamtholy). Aslinar dalam akun pribadinya, 11 Januari 2018 mengabarkan wabah ini telah merenggut 27 nyawa pengungsi dan 2.700 terinfeksi. Ia memperoleh kabar ini dari media massa negeri Bangladesh. Aslinar sendiri merupakan bagian dari tim 9 *Muhammadiyah Aid* bersama Kapuk (perawat PKU Muhammadiyah Solo) dan Pepi Perdiansyah (MDMC). Sampai waktu ini, menurut Syafiq Mughni (Ketua PP Muhammadiyah) telah ada 28 tenaga kesehatan Muhammadiyah yang bergabung dengan IHA. Untuk penerima manfaat layanan Muhammadiyah, Corona menyebutkan hingga 10 Januari 2018 sebanyak 15.950 pengungsi yang merasakannya. Khusus program kesehatan berupa nutrisi bagi anak-anak, yang telah menerima 1.863 jiwa.²⁰⁸

Suatu aktifitas yang telah dijalankan tentunya perlu dievaluasi, maka untuk keberlangsungan bantuan diselenggarakan Lokakarya dan Pembelajaran Penanganan Pengungsi Rohingya di Bangladesh tanggal 9

²⁰⁷ m.muhammadiyah.or.id, “Pengabdian Dokter Muda Muhammadiyah bagi Pengungsi Rohingya”, 19 Maret 2018

²⁰⁸ www.lazismu.org, “Pemerintah Bangladesh Apresiasi Tim Kemanusiaan Indonesia”, 30 Januari 2018

April 2018, di gedung dakwah PP Muhammadiyah. Dalam forum ini diinformasikan telah ada empat belas tim (total 39 tenaga medis) *Muhammadiyah Aid* yang tergabung dalam *Indonesia Humanitarian Alliance*. Mereka membantu penanganan medis pengungsi Rohingya yang terancam wabah difteri di *camp* Thangkali, Cox's Bazar. Dana yang terhimpun, berdasar catatan LAZISMU mencapai Rp. 20 milyar dan secara berkala telah didistribusikan melalui *Muhammadiyah Aid*. Lokakarya ini melibatkan “bagian” *Muhammadiyah Aid*: LAZISMU, MDMC, Majelis Pelayanan Sosial (MPS), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU). Dalam Lokakarya ini dibahas tujuan misi kemanusiaan yang membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi penyintas di Bangladesh. Muhammadiyah Aid berperan khusus dengan memenuhi kebutuhan akan kesehatan dan nutrisi untuk kelompok rentan. Setelah mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan selanjutnya untuk menghasilkan rekomendasi mendasar.²⁰⁹

²⁰⁹ www.lazismu.org, “Gelar Lokakarya, Muhammadiyah Aid Pertajam Agenda Penanganan Pengungsi Rohingya” 9 April 2018